

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023, ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Biro Organisasi pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Biro Organisasi kedepannya.

Jayapura, 19 Februari 2024

KEPALA BIRO,



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199112 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Metodeologi	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan ..	7
2.1 Anggaran Belanja	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas /Badan	8
BAB III. Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Dinas/Badan Tahun anggaran	13
2023.....	
3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	13
3.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2019-2023....	14
3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan.	14
BAB IV. Penutup.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk /Badan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas/Badan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas/Badan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam Renja Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2019- 2023.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2023.
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Renja ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Renja

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023.

BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2022, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Anggaran Belanja

Pada tahun 2023, Biro Organisasi mendapat belanja yang mendukung Rencana Kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp. **28.285.805.429,-** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel. 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Uraian Belanja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023. (F0)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Belanja Operasi	Rp. 28.285.805.429,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 9.266.356.200,-
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 19.019.449.229,-
	c. Belanja Hibah	Rp.
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.
2	Belanja Modal	Rp.
3	Belanja Tidak Terduga	Rp.
4	Belanja Transfer	Rp.
5	Belanja Bagi hasil	Rp.
6	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.
JUMLAH BELANJA		Rp. 28.285.805.429,-

Tabel 2.2
Uraian Belanja Biro Organisasi tahun anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	Belanja Operasi	Rp. 20.737.042.150,-	Rp. 28.285.805.429,-	Rp.7.548.763.279,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 3.273.984.800,-	Rp. 9.266.356.200,-	Rp.5.992.371.400,-
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 17.463.057.350,-	Rp. 19.019.449.229,-	Rp.1.556.391.879,-
	c. Belanja Hibah	Rp.		

	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp.		
3	Belanja Tidak Terduga	Rp.		
4	Belanja Transfer	Rp.		
5	Belanja Bagi hasil	Rp.		
6	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.		
JUMLAH BELANJA		Rp. 20.737.042.150,-	Rp. 28.285.805.429,-	Rp. 7.548.763.279,-

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada BIRO ORGANISASI

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja			SUMBER DANA
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA	13.819.039.334,00	9.325.814.701,00	67,49	OTSUS
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28.189.100,00	28.018.100	99,39	OTSUS
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.134.100,00	12.063.100,00	99,41	OTSUS
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.055.000,00	15.955.000,00	99,38	OTSUS
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.287.156.200,00	4.860.514.652,00	52,34	OTSUS
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.266.356.200,00	4.849.714.652,00	52,34	OTSUS

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0,00	0	OTSUS
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.800.000,00	10.800.000	100	OTSUS
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	956.700.000,00	924.150.690,00	96,60	OTSUS
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148.200.000,00	148.200.000,00	100	OTSUS
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	808.500.000,00	775.950.690,00	95,97	OTSUS
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	3.082.744.034,00	3.077.305.373,00	99,92	OTSUS
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.800.000,00	138.600.000,00	99,86	OTSUS
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	771.850.000,00	771.817.424,00	100	OTSUS
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000,00	19.800.000,00	100	OTSUS
1.4.4	Penyediaan Bahan material	211.416.484,00	211.033.386,00	99,82	OTSUS
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	312.020.000,00	312.020.000,00	100	OTSUS
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.620.000.000,00	1.615.282.013,00	99,71	OTSUS
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.857.550,00	8.752.550,00	98,81	OTSUS
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	224.500.000,00	210.666.250,00	93,84	OTSUS
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	4.911.750,00	27,29	OTSUS
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.500.000,00	139.754.500	99,47	OTSUS
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	100	OTSUS
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.750.000,00	225.159.636,00	93,91	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.750.000,00	225.159.636,00	93,91	OTSUS

2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	14.466.766.095,00	14.115.538.357,00	97,57	OTSUS
2.1	<i>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	9.477.976.445,00	9.277.362.066,00	97,88	OTSUS
2.1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	3.000.000.000,00	2.936.547.569,00	97,88	OTSUS
2.1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.392.458.020,00	95,70	OTSUS
2.1.3	Penataan Analisis Jabatan	3.977.976.445,00	3.948.356.477,00	99,26	OTSUS
2.2	<i>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	4.988.789.650,00	4.838.176.291,00	96,98	OTSUS
2.2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	726.183.600,00	683.812.200,00	94,17	OTSUS
2.2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1.381.401.850,00	1.363.084.350,00	98,67	OTSUS
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	302.866.100,00	300.158.851,00	99,11	OTSUS
2.2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1.087.818.600,00	1.072.027.618,00	98,55	OTSUS
2.2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1.490.519.500,00	1.419.093.272,00	95,21	OTSUS
JUMLAH		28.285.805.429,00	23.441.353.058,00	82,87	OTSUS

Catatan :

- 1 = Kode Program
- 1.1 = Kode Kegiatan
- 1.1.1 = Kode Sub Kegiatan

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Biro Organisasi Tahun 2023 melaksanakan : **2** Program, **8** Kegiatan dan **26** Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. **28.285.805.429,-** dengan realisasi keuangan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. **23.441.353.058,-** atau sebesar 82,87%.

Biro Organisasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**, terdiri atas beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan material
 - 1.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- 2.1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2.1.1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - 2.1.2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Penataan Analisis Jabatan
- 2.2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 2.2.1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 2.2.2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - 2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - 2.2.4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - 2.2.5. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

BAB III
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA
BIRO ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Biro Organisasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2019-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Biro Organisasi telah melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 ini sebesar Rp. 23.441.353.058,- dengan persentase capaian sebesar 82,87 %. Termasuk dalam kriteria penilaian “**Tinggi**”, Sementara itu untuk capaian kinerja Renstra 100% dan capaian keuangan Renstra sebesar 97,57%. capaian persentase termasuk dalam kroteria “**Sangat Tinggi**”

tabel terlampir.

3.2 Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD (Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2023. (Terlampir)

3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Biro Organisasi tidak memiliki hambatan yang berarti, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan begitu pula dalam penyediaan anggaran sesuai SPD yang diajukan ke BPKAD.

**TABEL
HAMBATAN DAN KENDALA**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			KEUANGAN	FISIK		

BAB IV PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Biro Organisasi.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Jayapura, 19 Pebruari 2024



KEPALA BIRO,

LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001

